

MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM DAN ASIA TENGGARA¹

Irfan Syauqi Beik

Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
Staf Pengajar FEM IPB dan Pascasarjana UIKA Bogor.

Abstrak

Salah satu isu penting yang dihadapi lembaga pendidikan ekonomi Islam adalah pembangunan kurikulum. Struktur kurikulum akan mempengaruhi kualitas output dari proses pendidikan yang dilakukan. Makalah ini mencoba menganalisis struktur kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang dilakukan di perguruan tinggi umum di Indonesia dan di Asia Tenggara. Makalah ini memilih Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airlangga untuk mewakili perguruan tinggi umum Indonesia, dan International Islamic University Malaysia untuk mewakili perguruan tinggi Asia Tenggara. Artikel ini juga membandingkan sistem yang berlaku di ketiga universitas ini. Selanjutnya, makalah ini mendiskusikan upaya standarisasi kurikulum pada tingkat Asia Tenggara dan membahas usulan pendirian asosiasi program studi ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi dan memperkuat kerjasama antar universitas di Asia Tenggara.

Kata kunci : ekonomi Islam, model kurikulum, standarisasi pendidikan

Abstract

One of the critical issues faced by educational institutions offering Islamic economics is development of curriculum. Structure of curriculum will determine the outcome of education process. This paper attempts to analyze curriculum structure of Islamic economics education at bachelor level offered by public universities in Indonesia and South East Asia. It selects Bogor Agricultural University and Airlangga University to represent public university in Indonesia and International Islamic University Malaysia to represent South East Asia. It also makes comparison on the systems prevailing in these three universities. This paper discusses attempts to standardize the curriculum at South East Asia regional and possibility to set up an association of Islamic economics study program which can be the media to share and strengthen the network among universities in the region.

Keywords: islamic economics, curriculum model, education standardization

¹ Versi awal makalah ini telah disampaikan pada acara Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam, UIN Jakarta 28 Februari 2012.

I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah selama hampir empat dekade terakhir sangat luar biasa. Bahkan institusi ekonomi dan keuangan syariah ini telah berkembang di lebih dari 100 negara di dunia. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan ini, ada satu masalah besar yang menjadi tantangan dunia ekonomi syariah saat ini, yaitu ketersediaan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi ekonomi syariah yang memadai.

Untuk mengatasi problematika ketersediaan SDM ini, pengembangan institusi dan kurikulum pendidikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi solusi yang paling tepat. Karena itu, sejak awal dekade 1980an, telah muncul berbagai upaya sistematis untuk mengembangkan institusi pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, yang diinisiasi melalui pendirian dua *pilot project* universitas pada skala global, yaitu International Islamic University Islamabad (IIUI) pada tahun 1980 dan International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 1983. Pendirian ini mendapat dukungan penuh dari OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan IDB (Islamic Development Bank).

Kehadiran kedua universitas tersebut, dimana pendidikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi *concern* utama pendiriannya, telah membawa spektrum baru dalam penataan sistem pendidikan tinggi, terutama di negara-negara anggota OKI. Keberadaan institusi pendidikan semacam ini menjadi semakin strategis ketika industri keuangan syariah mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Hal inilah yang kemudian mendorong perguruan tinggi di berbagai negara untuk membuka program pendidikan ekonomi syariah, disamping karena permintaan pasar, juga karena misi mulia untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan termasuk ekonomi.

Namun demikian, akibat permintaan yang begitu tinggi dari industri keuangan syariah, maka orientasi lembaga pendidikan tinggi pun mulai 'terfokus' pada pengembangan kurikulum keuangan syariah. Sehingga, pendidikan ekonomi syariah-nya sendiri menjadi kurang diperhatikan. Dimana-mana muncul perguruan tinggi yang membuka program *Islamic finance*, terutama di Timur Tengah dan Eropa, baik pada level sarjana maupun pascasarjana.

Ilmu ekonomi sebagai induk dari ilmu keuangan, mengalami ketertinggalan dari sisi kurikulum dan dari sisi ketersediaan buku teks. Buku-buku tentang perbankan syariah misalnya, dari sisi jumlah judul jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan buku mikroekonomi syariah. Bahkan pada banyak program S1 ekonomi Islam, *content* kurikulumnya justru didominasi oleh matakuliah-matakuliah keuangan syariah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa area atau bidang-bidang kajian dalam ekonomi syariah selain keuangan syariah, masih jauh tertinggal. Ini adalah tantangan bagi kalangan akademisi dan pemerhati ekonomi syariah, agar ekonomi syariah tidak dimaknai secara sempit menjadi keuangan syariah.

Untuk itu, beragam upaya pengembangan kurikulum terus dilakukan. Bahkan saat ini telah ada usaha untuk melakukan standarisasi kurikulum ekonomi syariah pada level internasional, dimana Asia Tenggara mengambil inisiatif terdepan. Dalam *Workshop on Islamic Economics Curriculum* di Kuala Lumpur tanggal 25-27 Juli 2011 lalu, yang dihadiri oleh 23 perguruan tinggi dan lembaga riset Malaysia dan Indonesia, disepakati untuk membuat *road map* standarisasi dan konsolidasi pendidikan ekonomi syariah, dengan fokus awal pada pendidikan di tingkat S1 (sarjana).

Tujuan standarisasi ini adalah agar output lulusan yang dihasilkan, dapat memiliki standar kompetensi minimal dalam penguasaan ilmu ekonomi syariah. Standarisasi ini pun bisa dikembangkan pada pendidikan keuangan syariah, karena jika dianalisis, pendekatan kurikulum keuangan syariah yang dilaksanakan di sejumlah negara juga masih berbeda-beda.

Meskipun usaha ini membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar, namun keberadaan model-model pendidikan yang telah dikembangkan, bisa menjadi input yang sangat berharga. Karena itu, makalah ini mencoba untuk mengelaborasi sejumlah model pendidikan dan kurikulum ekonomi syariah yang telah dikembangkan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia maupun di Malaysia, sebagai bahan perbandingan untuk merumuskan *blue print* ekonomi Islam di tanah air.

Untuk perguruan tinggi umum, dikarenakan oleh sejumlah keterbatasan, makalah ini hanya akan membahas model kurikulum yang telah dikembangkan oleh dua universitas, yaitu IPB dan Universitas Airlangga. Sedangkan untuk Malaysia, kurikulum International Islamic University Malaysia (IIUM) menjadi subyek yang akan dianalisis. Terakhir, akan dipaparkan pula hasil pertemuan tim kecil, sebagai tindak lanjut dari pertemuan *Workshop on Islamic Economics Curriculum I* yang telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 1 Februari 2012 lalu, dimana pada pertemuan tersebut telah disepakati sejumlah poin penting terkait dengan usulan kurikulum inti yang harus diadopsi oleh perguruan tinggi jika ingin memenuhi kualifikasi sebagai program S1 ekonomi Islam.

II. Model Kurikulum IPB

Pendidikan ekonomi syariah di IPB bermula pada tahun 2003 ketika satu mata kuliah Ekonomi Islam ditawarkan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah pilihan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini pun mengalami peningkatan, dari 86 mahasiswa pada tahun 2003 menjadi 292 mahasiswa pada tahun 2006.

Pada tahun 2005, dua matakuliah, yaitu Ekonomi Islam I dan Ekonomi Islam II, ditawarkan kepada mahasiswa. Namun demikian, pada tahun 2006, IPB mengembangkan kurikulum mayor minor, sehingga matakuliah ekonomi Islam tereduksi kembali menjadi satu matakuliah saja. Kurikulum mayor minor adalah kurikulum yang didesain untuk memberikan mahasiswa dua kompetensi, yaitu kompetensi utama dan kompetensi tambahan. Kompetensi utama didapat melalui kurikulum mayor/program studi yang diikuti, sedangkan kompetensi didapat setelah mengambil paket matakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang lain. Sebagai contoh, seorang mahasiswa prodi Ilmu Ekonomi Syariah memiliki kompetensi utama di bidang ekonomi syariah. Ketika ia mengambil paket minor dari program studi Matematika, maka ilmu matematika menjadi kompetensi tambahannya.

Standar minor itu sebanyak 15 SKS. Jika ternyata ada bentrok jadwal perkuliahan matakuliah mayor dengan minor, maka mayor harus didahulukan. Sebagai gantinya, mahasiswa boleh mengambil matakuliah dari program studi lain, yang berbeda dengan rencana awal minornya. Inilah yang disebut sebagai *supporting course*.

Sebagai contoh, mahasiswa ekonomi syariah yang mengambil minor matematika mengalami kesulitan karena jadwal kuliah yang bentrok. Maka ia pun dapat mengambil matakuliah yang ditawarkan oleh program studi Statistika. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak mengambil minor Matematika melainkan *supporting course* (SC). Total SC ini juga 15 SKS. Baik minor maupun SC akan dihitung dalam IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).

Perbedaan antara minor dengan SC ada dua. Pertama, untuk minor, mahasiswa harus mengambil seluruh paket matakuliah yang ditawarkan oleh program studi tertentu, sementara dalam SC, mahasiswa boleh mengambil matakuliah dari lebih dari satu prodi yang lain, asalkan jumlahnya tetap 15 SKS. Misal, mengambil 3 SKS dari program studi Matematika, 9 SKS dari Statistika dan 3 SKS lain dari Manajemen. Kedua, jika mengambil paket minor, maka di ijazah akan ditulis sebagai keahlian tambahan. Sementara dengan SC, tidak akan ditulis di ijazah sebagai keahlian tambahan.

Setelah implementasi kurikulum mayor minor, maka FEM IPB melalui keputusan senat fakultas pada tanggal 25 Maret 2009, sepakat untuk membentuk panitia persiapan pendirian Departemen Ekonomi dan Manajemen Syariah (EMS). Akhirnya pada bulan Februari 2010, Senat Akademik IPB menyetujui pendirian program studi S1 Ilmu Ekonomi Syariah (kata 'Manajemen' ditiadakan) yang berada di bawah asuhan Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB sampai program ini siap menjadi departemen tersendiri. Program studi telah di-*launching* pada tanggal 5 Mei 2010.

Jika melihat struktur kurikulum, maka kurikulum prodi Ilmu Ekonomi Syariah ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok matakuliah. Pertama, kelompok matakuliah TPB (Tingkat Persiapan Bersama)² sebanyak 31 SKS. Kedua, kelompok mata kuliah interdepartemen sebanyak 24 SKS. Ketiga, kelompok matakuliah mayor sebanyak 76 SKS. Keempat, kelompok mata kuliah minor atau SC sebanyak 15 SKS. Jika dijumlahkan, maka syarat untuk menamatkan pendidikan S1 ekonomi syariah adalah dengan menyelesaikan 146 SKS.

Khusus untuk kelompok matakuliah mayor, dapat dibagi lagi ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok matakuliah *turats* atau syariah (15 SKS), kelompok matakuliah ekonomi Islam (27-30 SKS), kelompok matakuliah manajemen, keuangan dan perbankan syariah (18-21 SKS), dan kelompok matakuliah lainnya (10 SKS)³. Keseluruhan matakuliah mayor ini mencapai angka 52,05 persen dari kurikulum yang ada. Tabel 1 berikut ini merangkum pengelompokan matakuliah beserta prosentase masing-masing matakuliah secara detail.

Tabel 1. Klasifikasi Kelompok Matakuliah S1 Ekonomi Syariah IPB

No	Kelompok Matakuliah	Jumlah SKS	Prosentase terhadap Kurikulum (%)
1	TPB	31	21,23
2	Interdepartemen	24	16,44
3	Mayor :		
	- Turats (syariah)	15	10,27
	- Ekonomi Islam	27 W + 3 P	18,49 – 20,55
	- Manajemen, keuangan dan perbankan syariah	18 W + 3 P	12,33 – 14,38
	- Lainnya	10	6,85
4	Minor	15	10,27
	TOTAL	146	

Keterangan : W = matakuliah wajib; P = matakuliah pilihan

Para mahasiswa program S1 ekonomi syariah ini diwajibkan mengambil matakuliah minor ataupun *supporting course* dari program studi lain sesuai minat dan keinginan masing-masing. Bagi mahasiswa program studi lain yang ingin mengambil minor ekonomi syariah, maka mereka harus mengambil paket matakuliah 15 SKS yang terdiri atas matakuliah Filosofi Ekonomi Syariah, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Mikroekonomi Syariah, Makroekonomi Syariah, dan Manajemen Produk Halal.

Dalam struktur kurikulum ini, matakuliah ekonomi konvensional juga masih diajarkan. Tujuannya agar para mahasiswa juga mengerti bagaimana konsep dasar dan cara beroperasinya ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini diajarkan melalui dua

² IPB mengenal kurikulum yang khusus didesain untuk mahasiswa tingkat pertama, yaitu kurikulum TPB. Seluruh mahasiswa akan mengambil matakuliah yang sama.

³ Kelompok matakuliah lainnya ini terdiri atas Kuliah Kerja Profesi, Seminar, dan Skripsi.

pendekatan, yaitu pertama, diajarkan secara langsung melalui matakuliah-matakuliah ekonomi konvensional, dan yang kedua, diajarkan dalam bentuk komparasi atau perbandingan pada matakuliah ekonomi syariah. Total matakuliah ekonomi konvensional murni mencapai angka 21,23 persen dari keseluruhan kurikulum. Adapun *content* komparasi ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah mencapai angka 10,27 persen dari keseluruhan kurikulum.

III. Model Kurikulum Universitas Airlangga

Ide awal untuk mengajarkan ekonomi Islam di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) muncul pada tahun 1998, yang kemudian ditindaklanjuti dalam sebuah workshop tentang kurikulum ekonomi syariah pada tahun 1999. Secara formal, pendidikan ekonomi syariah di Unair bermula pada tahun 2001 ketika satu matakuliah pilihan ekonomi Islam ditawarkan kepada mahasiswa. Pada tahun 2002, jumlah matakuliah ekonomi Islam ini bertambah menjadi lima matakuliah, dan menjadi konsentrasi ekonomi Islam.

Pada tahun 2006, konsentrasi ekonomi Islam kemudian dijadikan sebagai Minat Studi Ekonomi Islam (MSEI). Dalam waktu yang singkat, yaitu pada tahun 2007, MSEI ini kemudian dinaikkan statusnya menjadi Departemen, yaitu Departemen Ekonomi Islam.

Jika melihat pada struktur kurikulum yang ada, maka keseluruhan matakuliah yang harus diselesaikan mahasiswa berjumlah 145 SKS. Matakuliah ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu kelompok matakuliah wajib universitas (17 SKS), kelompok matakuliah wajib dari departemen lain (41 SKS), dan kelompok matakuliah departemen Ekonomi Islam itu sendiri (87 SKS).

Untuk matakuliah wajib dari departemen lain, para mahasiswa harus mengambil 18 SKS dari departemen Ilmu Ekonomi, 8 SKS dari departemen Akuntansi, dan 15 SKS dari departemen Manajemen. Jika dijumlahkan, maka keseluruhan matakuliah yang murni *Islamic* mencapai 15 matakuliah atau 32 persen dari total kurikulum, jumlah matakuliah yang murni konvensional mencapai angka 21 matakuliah atau 40 persen dari total kurikulum, dan jumlah matakuliah yang *content*-nya berisi perbandingan Islam dan konvensional (*Islamic shape*) berjumlah 14 matakuliah atau 28 persen dari total kurikulum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Klasifikasi Kelompok Matakuliah S1 Ekonomi Islam Unair

Jenis	Jumlah Matakuliah	Jumlah SKS	Prosentase terhadap Kurikulum (%)
Matakuliah murni <i>Islamic</i>	15	47	32
Matakuliah konvensional	21	58	40
Matakuliah <i>Islamic shape</i>	14	40	28
TOTAL	50	145	100

Sumber : Rasyidi dan Sukmana (2011)

Departemen Ekonomi Islam Unair juga menetapkan aturan bahwa mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal C untuk sejumlah matakuliah, yaitu : Pengantar Mikroekonomi Islam, Pengantar Makroekonomi Islam, Ushul Fiqh, Fiqh Muamalat, Matematika Ekonomi dan Statistika I. Khusus untuk staf pengajar, maka mereka diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran dan tidak memiliki rekening di bank konvensional sama sekali.

Saat ini, Unair tengah mengembangkan program S1 ekonomi Islam ke dalam lima konsentrasi, yaitu ilmu ekonomi Islam, manajemen keuangan Islam, kewirausahaan Islam, akuntansi Islam, dan fiqh Ekonomi Islam.

IV. Model Kurikulum International Islamic University Malaysia (IIUM)

IIUM didirikan pada tahun 1983. Sesuai dengan rekomendasi Konferensi Mekkah 1976, universitas ini mengemban misi untuk melakukan proses Islamisasi dan integrasi ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi. Fakultas Ekonomi (atau *Kulliyah of Economics*), yang kemudian diganti menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Manajemen (*Kulliyah of Economics and Management Sciences*), merupakan satu dari dua fakultas yang pertama kali berdiri di IIUM.

Program pendidikan S1 pada fakultas ini terdiri atas Bachelor of Economics, Bachelor of Business Administration, dan Bachelor of Accounting. Jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa mencapai angka 125 SKS. Khusus bagi mahasiswa yang mengambil program S1 ekonomi, sejak tahun 1997 diperbolehkan untuk mengikuti program *double degree* dengan mengambil S1 pada *Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage*, yaitu semacam Fakultas Agama Islam di Indonesia.

Sesuai dengan *Memorandum of Degree Recognition 1986*, pendekatan kurikulum dan metode pengajaran yang dikembangkan oleh IIUM adalah pendekatan komparatif dan integratif. Artinya, para mahasiswa diajarkan untuk menguasai teori konvensional dan Islami sekaligus, dan memahami bagaimana melakukan proses Islamisasi terhadap ilmu-ilmu konvensional yang telah berkembang saat ini.

Selanjutnya, jika melihat pada struktur kurikulum pendidikan ekonomi syariah IIUM, maka matakuliah-matakuliah yang ada dapat dibagi ke dalam empat kategori. Pertama, matakuliah wajib universitas (17 SKS), matakuliah wajib fakultas (36 SKS), matakuliah wajib departemen (36 SKS) dan matakuliah pilihan (36 SKS). Saat ini telah dikembangkan empat konsentrasi, yaitu ekonomi Islam, keuangan, ekonomi internasional, dan ekonomi pembangunan.

Jika ditelaah secara mendalam, berdasarkan jenis matakuliah, kurikulum pada IIUM didesain berdasarkan pada enam jenis matakuliah. Pertama, matakuliah ekonomi konvensional, yang berjumlah 21-57 SKS atau sekitar 17-46 persen dari keseluruhan kurikulum. Kedua, matakuliah dengan *Islamic input* (menggunakan pendekatan komparatif), yang berjumlah 27-57 SKS atau sekitar 22-46 persen dari keseluruhan kurikulum.

Ketiga, matakuliah ekonomi Islam murni, yang berjumlah 9-27 SKS atau sekitar 7-22 persen dari keseluruhan kurikulum. Keempat, matakuliah fiqh, yang berjumlah 6-9 SKS atau 5-7 persen dari keseluruhan kurikulum. Kelima, matakuliah usul Fiqh, yang berjumlah 6-9 SKS atau 5-7 persen dari keseluruhan kurikulum. Keenam, matakuliah Islami lainnya, yang berjumlah 12 SKS atau 10 persen dari keseluruhan kurikulum. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi Matakuliah S1 Ekonomi Islam IIUM

No	Kelompok Matakuliah	Jumlah SKS	Prosentase terhadap Kurikulum (%)
1	Ekonomi Konvensional	21-57	17-46
2	Matakuliah dengan <i>Islamic input</i>	27-57	22-46
3	Ekonomi Islam murni	9-27	7-22
4	Fiqh	6-9	5-7
5	Usul Fiqh	6-9	5-7
6	Matakuliah Islami lainnya	12	10
TOTAL		125	100

Sumber : Haneef dan Ruzita (2005)

Dengan melihat struktur kurikulum di atas, maka jika mahasiswa mengambil konsentrasi tertentu (misal *finance* maupun ekonomi pembangunan), prosentase maksimal matakuliah ekonomi konvensional yang dapat dipelajari adalah 46 persen. Sisanya (54 persen) adalah matakuliah ekonomi Islam, baik yang bersifat murni maupun dengan pendekatan komparasi. Jika mahasiswa lebih fokus pada pendalaman ekonomi Islam, maka jumlah minimal matakuliah ekonomi konvensional yang dipelajari adalah 21 SKS atau 17 persen dari keseluruhan kurikulum.

V. Standarisasi Kurikulum Asia Tenggara: Sebuah Proposal

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa pada bulan Juli 2011 lalu telah ada upaya untuk melakukan standarisasi pendidikan S1 ekonomi Islam pada level regional Asia Tenggara dalam sebuah workshop (*Workshop on Islamic Economics Curriculum*) di Kuala Lumpur⁴.

Pertemuan di Kuala Lumpur tersebut telah menghasilkan empat keputusan penting, yaitu :

1. Perlunya membangun standarisasi kurikulum sebagai *benchmark* bagi perguruan tinggi yang membuka program pendidikan ekonomi Islam;
2. Perlunya upaya integrasi yang lebih dalam antara ilmu-ilmu syariah dengan ekonomi modern, dan hal ini membutuhkan *epistemological reform* yang berkelanjutan;
3. Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini membuka peluang bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya di dunia Islam; dan
4. Keterbatasan SDM, lemahnya kualitas referensi, dan lemahnya jaringan antar perguruan tinggi merupakan permasalahan yang harus segera diatasi.

Dalam workshop tersebut juga disepakati untuk membuat workshop kedua, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Yogyakarta, dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tuan rumahnya. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka forum memutuskan untuk mengadakan rapat tim kecil untuk membuat usulan bagi workshop kedua tersebut. Pertemuan tim kecil tersebut telah dilaksanakan di kampus IPB Bogor pada tanggal 1 Februari 2012, dengan dihadiri oleh perwakilan Malaysia, Indonesia, perwakilan International Association for Islamic Economics dan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam⁵ dan menghasilkan *Bogor Resolution*.

Ada sejumlah poin penting terkait dengan standarisasi kurikulum pendidikan ekonomi Islam di Asia Tenggara, setelah melakukan kajian terhadap berbagai model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia dan Malaysia. Poin-poin tersebut antara lain :

⁴ *Workshop on Islamic Economics Curriculum* tersebut dihadiri oleh Universitas Andalas, Association for Islamic Finance Advancement (AIFA) Malaysia, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Banjarmasin, International Institute of Islamic Thought (IIIT) Asia Timur, Institut Kepahaman Islam Malaysia (IKIM), International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF), International Islamic University Malaysia, IAIN Sumatera Utara, International Islamic University College Selangor (KUIS), Segi University College, STEI Tazkia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Universiti Teknologi Mara, Universiti Sains Islam Malaysia, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁵ Rapat tim kecil dihadiri oleh Mohamed Aslam Haneef, Mustafa Omar Mohammed, Mohd Mahyudi, Agustianto, Irfan Syauqi Beik, Mukhaer Pakkanna, Suherman Rasyidi, Muhammad Nafik, Masyhudi Muqorobin, Ari Prasetyo, Dedi Budiman Hakim, Yusman Syaukat, Deni Lubis, Salahuddin El Ayyubi, dan Laily Dwi Arsyianti.

1. Untuk standarisasi kurikulum, diperlukan adanya standarisasi pada ***kurikulum inti*** ekonomi Islam. Kurikulum inti ini terdiri sekurang-kurangnya atas :
 - a. Matakuliah Ekonomi, berjumlah 15-21 SKS, yang terdiri atas :
 - Filosofi/prinsip dasar/dasar-dasar Ekonomi Islam;
 - 2 atau 3 matakuliah mikroekonomi dengan sekurang-kurangnya 1 matakuliah mikroekonomi dari perspektif Islam
 - 2 atau 3 matakuliah makroekonomi dengan sekurang-kurangnya 1 matakuliah makroekonomi dari perspektif Islam
 - b. Matakuliah *Heritage* atau *turats*, berjumlah 9-15 SKS, yang terdiri atas :
 - Usul Fiqh (2-3 SKS)
 - Fiqh Muamalah (2-3 SKS)
 - Bahasa Arab untuk Ekonomi/Ilmu Quran (0 atau 3 SKS)
 - Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam/Peradaban
 - Islamic Worldview/Studi Keislaman atau matakuliah yang sejenis
 - c. Matakuliah alat analisis, berjumlah 9-13 SKS, yang terdiri atas :
 - Matematika Ekonomi
 - Metode Statistika
 - Ekonometrika
 - Metode Riset atau Seminar (0-4 SKS)
2. Persyaratan minimal staf pengajar adalah berpendidikan master (S2) pada bidang terkait.
3. Perlunya peningkatan kualitas berkelanjutan, antara lain melalui *review* kurikulum secara reguler setiap 3-5 tahun sekali, penguatan kerjasama dan network antar universitas, *visiting scholar* dan saling berbagi pengalaman, dan lain-lain.
4. Perlunya mendirikan asosiasi regional program studi ekonomi Islam pada tingkat Asia Tenggara.

Dari usulan di atas terlihat bahwa jumlah SKS kurikulum inti adalah **33-49 SKS**. Ini adalah jumlah minimal yang harus ditawarkan oleh setiap universitas. Harapannya, dengan kurikulum inti seperti ini, maka setiap universitas memiliki keleluasaan dan ruang untuk mengembangkan kurikulum pendukung lainnya, termasuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Usulan ini, bagi Indonesia, juga berlaku untuk perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Khusus mengenai rencana pembentukan asosiasi program studi pada skala regional Asia Tenggara, ini dimaksudkan sebagai sarana dan media untuk saling berbagi dan memperkuat jaringan, agar pendidikan ekonomi syariah bisa terus dikembangkan.

Referensi

Beik, Irfan Syauqi. (2011). *Development of Islamic Economics Curriculum: IPB Approach*. Makalah disampaikan pada "Workshop on Islamic Economics Curriculum", 25-27 Juli, Kuala Lumpur, Malaysia.

_____ (2011). *Kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Akademik, Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, 6 April, Bogor, Indonesia.

BPS. (2010). *Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik*. Jakarta: BPS.

FEM IPB. (2010). *Proposal Pembentukan Mayor Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB*. Tidak dipublikasikan.

Haneef, M. A. (2011). *Developing Islamic Economics Curriculum: Lesson from the Islamization of Knowledge Agenda*. Makalah disampaikan pada International Lecture on Islamic Economics, FEM IPB, 30 April, Bogor, Indonesia.

_____ (2008). *Critical Survey on Islamization of Knowledge (2nd Edition)*. Kuala Lumpur: IIUM Press

_____, and Amin, R. M. (2005). *Teaching Islamic Economics at the Department of Economics, International Islamic University Malaysia*. Makalah disampaikan pada "The 6th International Conference on Islamic Economics and Finance", 21-24 November, Jakarta, Indonesia.

Hasan, Z. (1998). 'Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda', *IIUM Journal of Economics and Management*, Volume 6 No. 2.

Ishaq, K. A. (2003). *Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies*. Dissertation. University of Oregon.

Rasyidi, Suherman. dan Sukmana, Raditya. (2011). *Curriculum of Islamic Economic Department in Airlangga University*. Makalah disampaikan pada “Workshop on Islamic Economics Curriculum”, 25-27 Juli, Kuala Lumpur, Malaysia.

Workshop on Islamic Economics Resolutions (2011) dan Bogor Resolutions (2012).